



Sinergi Gereja, Pemerintah Desa, dan *Tobara'*: Model Pelayanan Transformatif Berbasis Teologi Publik di Masyarakat Kalumpang

Kalvin
STT Sulawesi Barat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi antara Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB), pemerintah desa, dan pemangku adat (*Tobara'*) dalam masyarakat Kalumpang serta merumuskan model sinergi sebagai strategi pelayanan gereja yang transformatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan penyebaran angket terhadap 18 pendeta GKSB yang melayani di wilayah Kalumpang, Bonehau, dan Sandana. Data dianalisis secara tematik dengan menggunakan perspektif teologi publik dan kepemimpinan kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara gereja, pemerintah desa, dan *Tobara'* umumnya berlangsung harmonis, tetapi masih didominasi oleh hubungan personal dan kegiatan seremonial sehingga belum berkembang menjadi kolaborasi kelembagaan yang strategis. Penelitian ini menawarkan model sinergi yang berlandaskan metafora "tali tiga lembar" (Pengkhutbah 4:12), yang memandang gereja, pemerintah desa, dan lembaga adat sebagai tiga pilar kepemimpinan masyarakat yang saling melengkapi. Model ini menempatkan gereja sebagai agen transformasi sosial yang membangun kemitraan kritis dengan pemerintah dan pemangku adat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, pelestarian lingkungan, serta pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Penelitian ini memperkaya kajian teologi publik melalui pengembangan model kepemimpinan kolaboratif yang kontekstual bagi gereja-gereja di wilayah adat.

Kata kunci: teologi publik; kepemimpinan kolaboratif; Gereja Kristen Sulawesi Barat; pemerintah desa; *Tobara'*; Kalumpang.

Abstract:

This study aims to analyze the relationship between the Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB), village government, and the customary leader (Tobara') within the Kalumpang community and to formulate a collaborative model as a transformative strategy for church ministry. The study employed a qualitative approach using a descriptive-analytical method through literature review, field observation, and questionnaires distributed to eighteen GKSB pastors serving in Kalumpang, Bonehau, and Sandana. The data were analyzed thematically using the perspectives of public theology and collaborative leadership. The findings reveal that although

the relationships among the church, village government, and customary institution are generally harmonious, they remain largely personal and ceremonial, and have not yet developed into strategic institutional collaboration. This study proposes a collaborative model based on the metaphor of the "threefold cord" (Ecclesiastes 4:12), viewing the church, village government, and customary institution as three complementary pillars of community leadership. The model positions the church as an agent of social transformation that establishes a critical partnership with the village government and customary leaders to promote justice, public welfare, environmental stewardship, and sustainable community development. This study contributes to the development of public theology by offering a contextual model of collaborative leadership for churches serving within indigenous communities.

Keywords: *public theology; collaborative leadership; Gereja Kristen Sulawesi Barat; village government; customary leader; Kalumpang.*

Pendahuluan

Perubahan sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan telah memperluas cakupan tanggung jawab gereja dalam melaksanakan misinya di tengah masyarakat. Gereja tidak lagi dipahami semata-mata sebagai institusi yang menyelenggarakan pelayanan liturgis dan pastoral, tetapi juga sebagai komunitas iman yang dipanggil untuk menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam seluruh dimensi kehidupan. Dalam perspektif teologi publik, kehadiran gereja di ruang publik merupakan konsekuensi dari panggilan iman untuk memperjuangkan keadilan, perdamaian, kesejahteraan, dan keutuhan ciptaan. Oleh karena itu, pelayanan gereja tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan.

Konteks pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB) di wilayah Kalumpang memperlihatkan bahwa gereja melayani masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan. Kemiskinan, keterisolasian akibat keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, kerusakan lingkungan, serta lemahnya tata kelola pemerintahan desa merupakan tantangan yang secara langsung memengaruhi kehidupan jemaat. Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi secara mandiri, melainkan memerlukan kerja sama berbagai pihak yang memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat.

Di tengah kehidupan masyarakat Kalumpang, terdapat tiga institusi yang memiliki pengaruh kuat dalam membentuk kehidupan sosial, yaitu gereja, pemerintah desa, dan lembaga adat yang dipimpin oleh *Tobara'*. Ketiganya memiliki fungsi, kewenangan, dan sumber daya yang berbeda, tetapi sama-sama berperan dalam mengarahkan kehidupan

masyarakat. Gereja memiliki otoritas moral dan spiritual, pemerintah desa menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, sedangkan *Tobara'* memelihara nilai-nilai budaya serta kohesi sosial masyarakat. Potensi tersebut merupakan modal sosial yang sangat besar bagi pembangunan masyarakat apabila mampu dikelola melalui pola hubungan yang kolaboratif.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antarlembaga tersebut belum berkembang secara optimal. Hubungan antara gereja dengan pemerintah desa maupun dengan *Tobara'* pada umumnya berlangsung dalam suasana yang harmonis, tetapi masih didominasi oleh komunikasi yang bersifat personal dan kegiatan seremonial. Kolaborasi yang berorientasi pada penyelesaian persoalan-persoalan strategis masyarakat masih relatif terbatas. Akibatnya, potensi besar yang dimiliki masing-masing institusi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menjawab tantangan sosial yang dihadapi masyarakat Kalumpang.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya suatu model kolaborasi yang mampu mengintegrasikan peran gereja, pemerintah desa, dan lembaga adat dalam kerangka pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, model tersebut dipahami melalui metafora **"tali tiga lembar tak mudah diputuskan"** (Pengkhotbah 4:12). Ungkapan tersebut dipakai sebagai simbol kekuatan yang lahir dari kebersamaan, saling menopang, dan kerja sama antareleman yang memiliki tujuan bersama. Dalam konteks masyarakat Kalumpang, metafora tersebut menjadi landasan konseptual untuk membangun sinergi antara gereja, pemerintah desa, dan *Tobara'* sebagai tiga pilar kepemimpinan masyarakat.

Sejumlah penelitian mengenai relasi gereja dan negara umumnya berfokus pada hubungan gereja, pemangku adat, dengan pemerintah dalam konteks politik, demokrasi, atau kebijakan publik. Penelitian terdahulu menegaskan pentingnya komunikasi dan komitmen antara tiga pilar penggerak pembangunan Desa Latdalam, yaitu pemerintah desa, gereja, dan lembaga adat melalui implementasi yang konsisten dan kesadaran bersama. Penelitian lainnya menyimpulkan bahwa lembaga adat, khususnya *ninik mamak*, memiliki peran strategis dalam pemerintahan desa di Kerinci sebagai pemberi pertimbangan, wakil masyarakat, dan penyelesaian sengketa adat. Kuatnya sistem sosial budaya menjadikan lembaga adat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan dan

pembangunan desa melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah desa.¹ Penelitian ini menawarkan konsep kolaborasi antarpilar sebagai solusi untuk mewujudkan pembangunan desa yang efektif, berkelanjutan, serta menjadi teladan bagi generasi penerus dalam mengembangkan budaya kolaboratif.² Adapula penelitian menyimpulkan bahwa kepemimpinan *Tobara'* memberikan dampak positif bagi pembangunan gereja melalui perannya sebagai mediator konflik, pencegah perpecahan, serta mitra gereja dan pemerintah dalam menciptakan kehidupan jemaat yang damai, harmonis, dan kooperatif.³ Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji relasi gereja, pemerintah desa, maupun lembaga adat, sebagian besar masih menempatkan ketiga institusi tersebut secara terpisah. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengonstruksi model sinergi ketiganya sebagai paradigma pelayanan transformatif berbasis teologi publik dalam konteks masyarakat Kalumpang. Kekosongan inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis relasi antara gereja, pemerintah desa, dan *Tobara'* dalam masyarakat Kalumpang serta merumuskan model sinergi yang dapat memperkuat pelayanan GKSBB di ruang publik. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memusatkan perhatian pada relasi gereja, pemerintah desa, dan pemangku adat sebagai tiga pilar kolaboratif dalam konteks pembangunan desa, bukan hanya pada hubungan gereja dengan negara atau adat dalam ruang politik dan kebijakan publik. Fokusnya tidak semata-mata pada posisi kelembagaan masing-masing, tetapi pada pola komunikasi, sinergi, dan praktik kolaborasi nyata di tingkat desa sebagai ruang hidup bersama. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan kolaborasi antarpilar sebagai model pembangunan desa yang efektif, berkelanjutan, dan berakar pada nilai lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-

¹ M.yusuf, "Eksistensi Pemangku Adat Dalam Pengambilan Keputusan Desa Di Kerinci," *Tanah Pilih* 1, no. 1 (2020): 11–19.

² Yulius Laturmas, "Religion, Customs, and Village Government in Collaborating the Pillars of Rural Development," *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 2, no. 4 (2022): 440–447.

³ Henri Sirangki and Darius, "Sumbangsih Eksistensi Kepemimpinan *Tobara'* Terhadap Pembangunan Jemaat Di Lembang Siraun, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat," *SOPHIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 3, no. 1 (2022): 50–63.

analitis untuk mengkaji model sinergi antara gereja, pemerintah desa, dan pemangku adat (*Tobara'*) dalam pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB) di wilayah Kalumpang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam dinamika relasi antarlembaga, konteks sosial-budaya masyarakat, serta makna teologis yang melandasi praktik pelayanan gereja dalam kehidupan publik.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan teologi publik, relasi gereja dan negara, kepemimpinan kolaboratif, hukum adat, serta literatur mengenai budaya masyarakat Kalumpang. Selain itu, penelitian lapangan dilakukan melalui observasi terhadap kehidupan masyarakat dan praktik pelayanan gereja, serta penyebaran angket kepada 18 pendeta GKSB. Seluruh responden merupakan pendeta GKSB yang aktif melayani di wilayah Kalumpang, Bonehau, dan Sandana sehingga dipandang mampu memberikan informasi yang relevan mengenai relasi gereja, pemerintah desa, dan *Tobara'*. Angket digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pola relasi gereja dengan pemerintah desa dan *Tobara'*, bentuk kerja sama yang telah berlangsung, serta tantangan yang dihadapi dalam membangun kolaborasi lintas lembaga.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil observasi, angket, dan kajian pustaka, kemudian menginterpretasikannya menggunakan perspektif teologi publik dan kepemimpinan kolaboratif. Selanjutnya, temuan empiris didialogkan dengan kesaksian Alkitab serta nilai-nilai budaya masyarakat Kalumpang untuk merumuskan model sinergi gereja, pemerintah desa, dan pemangku adat sebagai bentuk pelayanan gereja yang kontekstual dan transformatif.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan realitas hubungan antara gereja, pemerintah desa, dan pemangku adat, tetapi juga menawarkan konstruksi teologis mengenai pola kolaborasi yang dapat memperkuat peran gereja dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di Kalumpang..

Hasil dan Pembahasan

Makna "Tali Tiga Lembar" Sebagai Model Kolaborasi

Ungkapan “tali tiga lembar tak mudah diputuskan” dalam Pengkhotbah 4:12 telah lama dipahami sebagai metafora tentang kekuatan yang lahir dari kebersamaan. Meskipun perikop Pengkhotbah 4:7–16 sering dikaitkan dengan kehidupan perkawinan, pembacaan terhadap keseluruhan konteks menunjukkan bahwa pesan utamanya tidak terbatas pada relasi suami istri. Pernyataan seperti “berdua lebih baik daripada seorang diri” (ay. 9), “jika mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya” (ay. 10), dan “jika dua orang tidur bersama-sama, mereka menjadi panas” (ay. 11) menegaskan pentingnya solidaritas, saling menopang, dan kerja sama dalam kehidupan manusia secara umum. Dengan demikian, makna teologis perikop ini lebih menekankan nilai kebersamaan sebagai sumber kekuatan daripada institusi perkawinan secara khusus.

Dalam konteks tulisan ini, metafora tali tiga lembar digunakan untuk menggambarkan model kolaborasi antara gereja, pemerintah, dan pemangku adat (*Tobara'*) dalam membangun kehidupan masyarakat Kalumpang. Ketiga institusi tersebut dipandang sebagai unsur kepemimpinan yang memiliki fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi. Sebagaimana tiga helai tali yang dipintal menjadi satu menghasilkan kekuatan yang lebih besar dibandingkan jika berdiri sendiri, demikian pula sinergi ketiga lembaga tersebut akan melahirkan daya transformasi yang lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi menjadi modal sosial yang memperkuat solidaritas, memperluas partisipasi, dan meningkatkan kapasitas komunitas dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

Secara historis, gambaran tentang tali yang dipintal dari tiga helai telah dikenal sejak zaman Perjanjian Lama sebagai bentuk pengetahuan praktis masyarakat. Angka tiga dalam Pengkhotbah 4:12 tidak dimaksudkan sebagai simbol teologis tertentu, melainkan menggambarkan prinsip sederhana bahwa beberapa unsur yang dipadukan akan menghasilkan kekuatan yang lebih kokoh. Tradisi memintal tali dari tiga helai dipilih karena memberikan keseimbangan antara kekuatan dan kelenturan. Prinsip tersebut relevan sebagai metafora bagi kehidupan sosial, karena komunitas yang kuat bukan hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan mengintegrasikan berbagai potensi yang ada.

Dalam perspektif sosiologis, tali yang lentur sekaligus kuat juga melambangkan adaptabilitas dalam kehidupan bersama. Fleksibilitas memungkinkan tali menjalankan fungsinya sebagai pengikat tanpa kehilangan kekuatannya. Demikian pula, kolaborasi antarlembaga menuntut kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial tanpa mengorbankan identitas dan prinsip-prinsip yang mendasar. Adaptabilitas menjadi prasyarat bagi terbentuknya relasi yang sehat, dialogis, dan produktif di tengah masyarakat yang terus berubah.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era digital berlangsung sangat pesat, salah satunya ditandai dengan hadirnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) yang kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ke depan, peran AI diperkirakan akan semakin signifikan seiring kemampuannya dalam menjalankan berbagai tugas yang sebelumnya bergantung sepenuhnya pada kecerdasan manusia, seperti persepsi visual, pengenalan suara, penerjemahan bahasa, hingga pengambilan keputusan. Meskipun demikian, secanggih apa pun AI, teknologi ini tidak dapat sepenuhnya menggantikan kecerdasan alami manusia. Kecerdasan manusia tidak hanya bertumpu pada kemampuan kognitif, tetapi juga melibatkan dimensi afektif berupa hati nurani, empati, dan kepekaan moral yang menjadi ciri khas kemanusiaan.

Emosi dan perasaan merupakan anugerah Allah yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Dalam perspektif teologis, hati dipahami sebagai pusat batin tempat lahirnya kasih, empati, sukacita, kesedihan, pengampunan, dan berbagai pengalaman emosional yang membentuk relasi antarmanusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Emmanuel Gerrit Singgih, salah satu alasan manusia tetap percaya kepada Allah di tengah dunia modern ialah karena Allah dipahami sebagai Pribadi yang memiliki perasaan dan menjalin relasi dengan manusia. Ironisnya, kemajuan teknologi digital yang semakin mendekatkan manusia secara virtual juga berpotensi menciptakan jarak emosional dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, kemampuan untuk merasakan, berempati, mengasihi, dan hidup dalam relasi yang sehat tetap menjadi nilai yang tidak dapat digantikan oleh teknologi.

Pada akhirnya, kecerdasan teknologi memiliki batas yang tidak dapat dilampauinya, yaitu ranah hikmat. AI dapat mengolah data, menghasilkan karya kreatif, bahkan membantu proses pengambilan keputusan, tetapi tidak memiliki kebijaksanaan moral dan spiritual sebagaimana dimiliki manusia. Prinsip inilah yang ditekankan dalam

kitab Pengkhotbah, khususnya Pengkhotbah 4:13, yang menyatakan bahwa seorang muda yang miskin tetapi berhikmat lebih baik daripada seorang raja yang tua namun bodoh. Dengan demikian, hikmat menjadi kualitas tertinggi yang memberi arah bagi penggunaan pengetahuan dan teknologi, sehingga kehidupan manusia tidak berakhir pada kesia-siaan, melainkan memiliki makna, tujuan, dan harapan sesuai kehendak Allah.⁴

Prinsip tersebut memiliki dasar biblis dalam Matius 10:16, ketika Yesus mengutus para murid untuk menjadi “cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.” Nasihat ini menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi tidak identik dengan sikap oportunis atau kehilangan integritas, melainkan kecakapan membaca situasi secara bijaksana sambil tetap memegang teguh nilai-nilai Kerajaan Allah. Dengan demikian, adaptabilitas menjadi bagian penting dari kepemimpinan kolaboratif yang mampu menjembatani perbedaan dan membangun kerja sama yang konstruktif.

Bagi masyarakat Kalumpang, konsep tali tiga lembar menemukan padanan budaya dalam konsep lalihan *to titanan tallu atau tiga tungku*, yaitu gereja, pemerintah, dan *Tobara'* sebagai tiga pilar kepemimpinan masyarakat. Menurut Joas Adiprasetya, kepemimpinan yang diharapkan dalam masyarakat yang sedang berubah membutuhkan adaptabilitas.⁵ Adaptabilitas merupakan prasyarat utama bagi kepemimpinan dalam suatu komunitas yang terus menghadapi dinamika perubahan. Kemampuan beradaptasi menjadi semakin penting ketika perubahan tersebut melahirkan kompleksitas dan pluralitas yang semakin tinggi. Meskipun seseorang memiliki kapasitas akademik yang unggul serta kualifikasi personal yang baik, tanpa kemampuan beradaptasi dan bekerja sama secara efektif, kepemimpinannya akan sulit diterima serta kurang mampu menghasilkan dampak yang signifikan bagi komunitas. Ketiganya memiliki otoritas dan ruang pelayanan yang berbeda, tetapi diarahkan pada tujuan yang sama, yakni mewujudkan kehidupan bersama yang adil, harmonis, dan sejahtera. Oleh karena itu, kolaborasi antara gereja, pemerintah, dan pemangku adat tidak hanya merupakan kebutuhan praktis dalam pembangunan masyarakat, tetapi juga mencerminkan suatu model kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai Alkitab sekaligus menghargai kearifan

⁴ Eka Darmaputera, *Merayakan Hidup: Pemahaman Kitab Pengkhotbah Tentang Kesia-Siaan Segala Sesuatu* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015).

⁵ Joas Adiprasetya, “Pendeta Yang Adaptif: Most Wanted Atau Least Wanted,” in Calvinis Aktual, ed. Budiman Haryanto (Jakarta: Komisi Pengkajian Teologi Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sinode Wilayah Jawa Barat, 2010).

lokal. Ketika ketiga unsur tersebut mampu bekerja secara sinergis, masyarakat memperoleh fondasi sosial yang lebih kokoh sehingga tidak mudah terpecah oleh berbagai tantangan maupun kepentingan yang bersifat sektoral.

Relasi Gereja Dan Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Gereja-gereja di Indonesia pada umumnya mewarisi pemikiran teologi John Calvin yang memandang gereja dan negara sebagai dua institusi yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Keduanya memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, namun sama-sama berada di bawah kedaulatan Allah dan diarahkan untuk mewujudkan kemuliaan-Nya. Pemisahan antara gereja dan negara dimaksudkan bukan untuk menciptakan pertentangan, melainkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, baik dalam bentuk sakralisasi negara maupun absolutisasi agama, sehingga tidak terjadi penumpukan otoritas pada satu lembaga yang berpotensi mengancam kehidupan bersama.

Dalam perspektif Calvin, negara merupakan ruang tempat Allah menyatakan kedaulatan-Nya. Sebagaimana dijelaskan oleh Robert Setyo, pandangan tersebut menegaskan bahwa negara bukanlah wilayah yang profan atau harus di jauhi oleh gereja.⁶ Sebaliknya, pemahaman ini menjadi dasar teologis bagi keterlibatan gereja dalam kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan. Karena itu, anggapan bahwa Calvin menghendaki gereja bersikap pasif atau menarik diri dari ruang publik merupakan penafsiran yang kurang tepat. Perbedaan antara gereja dan negara tidak dimaksudkan untuk membenarkan sikap diam terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau praktik pemerintahan yang otoriter, melainkan agar masing-masing institusi menjalankan tanggung jawabnya secara proporsional di bawah otoritas Allah.

Landasan teologis tersebut juga selaras dengan teladan pelayanan Yesus Kristus. Pewartaan tentang Kerajaan Allah tidak pernah dipisahkan dari perhatian terhadap persoalan-persoalan konkret kehidupan manusia. Selain menyerukan pertobatan, Yesus memberi makan orang yang lapar, menyembuhkan mereka yang sakit, menerima kaum yang tersisih, membangun relasi dengan orang berdosa, serta menyampaikan kritik

⁶ Robert Setyo, "Hubungan Timbal Balik Antara Gereja Dan Negara," in *Calvinis Aktual*, ed. Budiman Haryanto (Jakarta: Komisi Pengkajian Teologi Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sinode Wilayah Jawa Barat, 2010).

terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, keterlibatan gereja dalam kehidupan sosial dan pemerintahan bukan merupakan penyimpangan dari panggilannya, melainkan perwujudan iman yang menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah di tengah masyarakat. Relasi antara gereja dan pemerintah desa perlu dipahami sebagai bagian dari panggilan teologis gereja untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Panggilan tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks desa-desa yang masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti kemiskinan, keterisolasian, keterbatasan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta lemahnya tata kelola pemerintahan desa. Dasar biblis bagi keterlibatan gereja dalam kehidupan masyarakat dapat ditemukan dalam Yeremia 29:7 yang mengajak umat Allah untuk mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka berada, sebab kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan umat itu sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa doa bagi pemerintah harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang berkontribusi bagi kebaikan bersama.

Pemikiran teologis John Calvin menunjukkan bahwa keterlibatan gereja dalam kehidupan publik tidak berarti tunduk kepada kekuasaan negara, melainkan menjalankan tanggung jawab profetis terhadap pemerintah.⁷ Hal ini tampak dalam surat pengantar Calvin kepada Raja Francis I of France pada awal *Institutio Christianae Religionis*. Dalam surat tersebut, Calvin mengingatkan bahwa seorang raja adalah hamba Allah yang berkewajiban memelihara kemuliaan-Nya melalui penegakan keadilan dan kebenaran. Pemerintahan yang tidak diarahkan untuk melayani kemuliaan Allah kehilangan legitimasi moralnya. Dengan demikian, kritik yang disampaikan Calvin bukanlah bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan panggilan agar penguasa menjalankan mandatnya sesuai kehendak Allah.

Teladan yang lebih utama ditemukan dalam pribadi Yesus Kristus. Injil memperlihatkan bahwa Yesus tidak bersikap kompromistis terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam Injil Lukas 13:32, Yesus menyebut Raja Herod Antipas sebagai "serigala", sebuah metafora yang menggambarkan penguasa yang licik, kejam, dan tidak bermoral. Sebutan tersebut menegaskan bahwa otoritas politik tidak kebal terhadap kritik ketika dijalankan secara sewenang-wenang. Namun demikian, sikap kritis Yesus tetap

⁷ Yohanes Calvin, *Institutio: Pengajaran Agama Kristen* (BPK Gunung Mulia, 1999).

dilandasi kasih, kebenaran, dan hikmat, bukan kebencian ataupun kekerasan. Prinsip yang sama tampak dalam ajaran-Nya, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah" (Mat. 22:21). Pernyataan ini menegaskan bahwa penghormatan kepada pemerintah tetap penting, tetapi ketaatan kepada Allah merupakan norma tertinggi yang menjadi dasar setiap bentuk ketaatan kepada penguasa.

Meskipun misi utama Yesus bukanlah membangun kekuasaan politik, pelayanan-Nya memiliki implikasi sosial dan politik yang nyata. Pewartaan Kerajaan Allah diwujudkan melalui pembelaan terhadap mereka yang tertindas, pemulihan martabat manusia, penegakan keadilan, dan kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, gereja sebagai tubuh Kristus dipanggil untuk melanjutkan misi tersebut melalui keterlibatan aktif dalam kehidupan publik. Kehadiran gereja dalam ruang sosial dan politik bukan dimaksudkan untuk merebut kekuasaan, melainkan menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah, seperti keadilan, perdamaian, kesejahteraan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pemeliharaan ciptaan.

Dalam konteks Indonesia, hubungan gereja dengan politik tidak dapat dilepaskan dari pengalaman sejarah. Masa kolonial hingga rezim Orde Baru mewariskan paradigma yang memandang politik sebagai wilayah yang harus dihindari oleh gereja. Kebijakan depolitisasi masyarakat sipil pada masa Orde Baru membatasi partisipasi publik, membungkam kritik, serta membentuk budaya politik yang cenderung apatis. Akibatnya, banyak gereja memahami panggilannya hanya terbatas pada pelayanan spiritual, sedangkan keterlibatan dalam urusan sosial dan politik dianggap berada di luar mandat gereja. Warisan pemikiran tersebut masih memengaruhi sebagian gereja hingga saat ini.

Pandangan demikian perlu dikaji kembali secara teologis. Keterlibatan gereja dalam kehidupan publik bukanlah bentuk perebutan kekuasaan politik, melainkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan profetis. Gereja dipanggil menjadi suara moral yang mengawal penyelenggaraan pemerintahan agar tetap menjunjung keadilan, menghormati hak asasi manusia, memperjuangkan kesejahteraan bersama, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam perspektif ini, gereja berfungsi sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) yang turut memperkuat kehidupan demokrasi melalui pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan. Partisipasi tersebut merupakan wujud tanggung jawab iman sekaligus kontribusi nyata bagi terciptanya pemerintahan

yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan rakyat (*salus populi est suprema lex*).

Oleh sebab itu, gereja perlu membedakan secara tegas antara politik praktis dan tanggung jawab publik. Politik praktis yang berkaitan dengan perebutan jabatan dan kekuasaan merupakan ranah partai politik dan para politisi, sedangkan keterlibatan dalam persoalan keadilan, kesejahteraan, perdamaian, serta perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan bagian integral dari panggilan gereja. Dalam menjalankan fungsi tersebut, gereja mengikuti tradisi profetis para nabi Perjanjian Lama, seperti Nathan, Hosea, Amos, dan Isaiah, yang berani menegur penguasa demi menegakkan kehendak Allah. Sejalan dengan itu, PGI dalam Dokumen Keesaan Gereja menegaskan bahwa partisipasi gereja dalam kehidupan masyarakat dan negara merupakan perwujudan nyata dari pelayanannya bagi dunia.⁸ Dengan demikian, gereja yang hadir secara aktif dalam ruang publik bukan hanya melaksanakan tanggung jawab sosial, tetapi juga mewujudkan panggilan iman sebagai saksi kebenaran dan mitra Allah dalam menghadirkan tanda-tanda Kerajaan-Nya di tengah masyarakat.

Dalam perspektif teologi publik, gereja tidak hanya dipanggil untuk memberikan dukungan spiritual kepada pemerintah melalui doa, tetapi juga untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui advokasi terhadap kelompok rentan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan politik warga, penguatan etika publik, serta fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, relasi gereja dan pemerintah desa tidak bersifat subordinatif ataupun konfrontatif, melainkan merupakan kemitraan yang bertujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Hubungan yang konstruktif antara gereja dan pemerintah desa memerlukan komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan didukung oleh kemampuan adaptasi para pemimpin gereja terhadap dinamika sosial. Adaptabilitas memungkinkan gereja menyampaikan kritik secara profetis tanpa kehilangan semangat dialog dan kerja sama. Dalam kerangka ini, gereja tidak dipanggil untuk menjadi oposisi terhadap pemerintah, tetapi juga tidak boleh kehilangan keberanian moral untuk mengingatkan pemerintah ketika kebijakan atau praktik penyelenggaraan pemerintahan menyimpang dari prinsip-

⁸ Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, *Dokumen Keesaan Gereja: Persekutuan Gereja-gereja Di Indonesia (DKG-PGI)* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020).

prinsip keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan masyarakat.

Konteks pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB) menunjukkan bahwa persoalan sosial yang dihadapi masyarakat masih sangat kompleks. Kemiskinan, keterbelakangan, keterisolasian akibat buruknya infrastruktur jalan, rendahnya mutu pendidikan, terbatasnya tenaga pendidik, lemahnya pelayanan kesehatan, tingginya angka kematian ibu dan anak, serta praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan desa merupakan persoalan nyata yang memerlukan perhatian bersama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan gereja tidak dapat dibatasi hanya pada dimensi liturgis dan pastoral, tetapi juga harus diwujudkan dalam keterlibatan sosial yang transformatif. Gereja yang mengabaikan persoalan-persoalan tersebut berisiko kehilangan relevansi sosialnya di tengah masyarakat.

Temuan penelitian melalui angket terhadap 18 pendeta GKSB yang melayani di jemaat-jemaat dengan kepala desa yang berasal dari warga GKSB memperlihatkan bahwa hubungan antara gereja dan pemerintah desa umumnya berlangsung dalam suasana yang harmonis, tetapi belum berkembang menjadi kemitraan kelembagaan yang produktif. Mayoritas responden menyatakan memiliki hubungan personal yang baik dengan kepala desa, namun hubungan tersebut belum diwujudkan dalam kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga.

Selain itu, sebagian besar responden mengungkapkan bahwa interaksi antara gereja dan pemerintah desa masih didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Pendeta sering diundang dalam kegiatan pemerintahan desa, demikian pula kepala desa hadir dalam berbagai kegiatan gereja, tetapi keterlibatan tersebut umumnya terbatas pada kehadiran formal tanpa diikuti ruang dialog yang membahas persoalan-persoalan strategis masyarakat. Peran gereja masih didominasi oleh pelayanan doa syafaat bagi pemerintah, sementara fungsi edukatif, konsultatif, dan profetis belum dijalankan secara optimal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hanya sekitar separuh responden pernah mengikuti forum pembahasan pembangunan desa. Namun demikian, forum-forum tersebut cenderung berlangsung secara formal dan belum membuka ruang dialog yang partisipatif, kritis, dan transparan. Akibatnya, para pendeta cenderung enggan menyampaikan kritik maupun masukan terhadap kebijakan pemerintah desa dan lebih memilih mempertahankan hubungan yang harmonis daripada menjalankan fungsi

profetis gereja.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa relasi gereja dan pemerintah desa masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek kolaborasi substantif. Gereja perlu mengembangkan model kemitraan yang tidak hanya berorientasi pada hubungan personal, tetapi juga pada kerja sama kelembagaan yang berkelanjutan dalam menjawab persoalan-persoalan pembangunan masyarakat. Sebagai mitra pemerintah, gereja dipanggil untuk memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi kritis terhadap praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, dan korupsi.

Dalam konteks masyarakat Kalumpang, tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting mengingat masih banyak persoalan pembangunan yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, gereja tidak cukup hanya menyampaikan kritik terhadap pemerintah, tetapi juga perlu melakukan refleksi terhadap kontribusinya sendiri dalam pembangunan masyarakat. Sikap apatis dan pembiaran terhadap berbagai persoalan publik bertentangan dengan panggilan etis gereja sebagaimana ditegaskan dalam Yakobus 4:17, bahwa mengetahui kebaikan tetapi tidak melakukannya merupakan suatu bentuk dosa. Dengan demikian, fungsi profetis gereja tidak hanya diwujudkan melalui pewartaan Firman, tetapi juga melalui keberanian mengambil tindakan nyata dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, GKSMB memikul tanggung jawab strategis dalam membangun masa depan masyarakat Kalumpang. Relevansi gereja tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelayanan ibadah, tetapi juga oleh kemampuannya membentuk karakter warga gereja yang berintegritas dan bertanggung jawab secara sosial. Pembinaan rohani yang berkesinambungan, dimulai dari keluarga sebagai basis pendidikan iman, menjadi fondasi penting dalam membangun budaya hidup yang jujur, adil, dan peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, gereja perlu mempercepat transformasi pelayanannya melalui penguatan kepemimpinan yang kolaboratif, pemberdayaan keluarga, serta peningkatan partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat sebagai wujud nyata kehadiran Kerajaan Allah di tengah kehidupan sosial.

Relasi Gereja dan Pemangku Adat: Membangun Kepemimpinan Kolaboratif dalam Masyarakat Kalumpang

Keberadaan lembaga adat masih memiliki posisi yang kuat dalam kehidupan masyarakat Kalumpang. Di tengah arus modernisasi, masyarakat tetap mengakui *Tobara'* sebagai salah satu pilar kepemimpinan yang memiliki legitimasi sosial dan budaya. Eksistensi tersebut tidak terlepas dari fakta historis bahwa sebelum hadirnya Kekristenan, kehidupan masyarakat Kalumpang telah diatur melalui sistem kepemimpinan adat yang dipimpin oleh *Tobara'*. Kemampuan masyarakat mempertahankan identitas budaya hingga saat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tradisional memiliki kontribusi penting dalam menjaga kohesi sosial masyarakat.

Dalam perkembangannya, proses penginjilan membawa perubahan terhadap praktik-praktik adat. Sejumlah tradisi lokal pernah ditinggalkan karena dipandang bertentangan dengan ajaran Kristen. Namun, seiring berkembangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya, berbagai tradisi yang dinilai memiliki nilai positif mulai direvitalisasi. Kondisi ini membuka ruang dialog antara gereja dan lembaga adat untuk membangun relasi yang saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat.

Secara tradisional, *Tobara'* berperan sebagai pemimpin adat yang bertanggung jawab menegakkan hukum adat dan menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Dalam pandangan kosmologis masyarakat Kalumpang, setiap pelanggaran terhadap norma adat dipahami sebagai tindakan yang mengganggu harmoni antara manusia, alam, dan komunitas. Oleh karena itu, pemberian sanksi adat tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelaku, tetapi sebagai upaya memulihkan keseimbangan yang dianggap terganggu akibat pelanggaran tersebut.

Salah satu bentuk penegakan hukum adat adalah praktik *Seda*, yaitu pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran melalui pengorbanan hewan sebagai bagian dari ritual *ma'base tondok* atau pemulihan kehidupan kampung. Dalam perspektif masyarakat adat, ritual tersebut memiliki makna simbolis sebagai proses rekonsiliasi antara pelaku, masyarakat, dan tatanan kosmis. Meskipun demikian, dalam konteks masyarakat kontemporer, praktik tersebut memerlukan refleksi kritis agar tetap relevan dengan perkembangan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan ajaran Kristen.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi *Tobara'* saat ini masih didominasi oleh penegakan sanksi terhadap pelanggaran, khususnya pelanggaran seksual. Ruang lingkup kepemimpinan yang cenderung berorientasi pada fungsi represif tersebut berpotensi membatasi kontribusi lembaga adat dalam menjawab berbagai persoalan

sosial yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan transformasi peran *Tobara'* dari sekadar penegak sanksi menjadi pemimpin komunitas yang juga berfungsi sebagai pendidik, fasilitator, dan penggerak perubahan sosial.

Transformasi tersebut menjadi semakin mendesak mengingat masyarakat Kalumpang menghadapi berbagai tantangan baru, terutama krisis ekologis. Kerusakan hutan, pencemaran sungai, berkurangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya banjir dan kekeringan, serta perubahan pola musim merupakan persoalan yang secara langsung memengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam konteks ini, kearifan ekologis yang terkandung dalam kosmologi masyarakat Kalumpang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai dasar etika lingkungan.

Pandangan tradisional masyarakat Kalumpang yang memandang tanah, air, tumbuhan, hewan, dan manusia sebagai satu kesatuan kehidupan sejalan dengan perspektif etika lingkungan yang menekankan relasi saling bergantung antara manusia dan alam.⁹ Oleh karena itu, gereja bersama *Tobara'* memiliki peluang strategis untuk membangun pendidikan ekologis berbasis iman dan budaya lokal. Kolaborasi tersebut dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab moral seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, pemikiran Robert P. Borrong mengenai etika lingkungan menjadi relevan, terutama ketika ia menegaskan bahwa krisis ekologis modern berakar pada eksploitasi alam yang mengabaikan etika dan tanggung jawab moral.¹⁰

Meskipun demikian, proses revitalisasi adat tetap memerlukan refleksi teologis yang kritis. Gereja perlu memastikan bahwa praktik-praktik adat yang dipertahankan selaras dengan nilai-nilai Injil, sementara unsur-unsur yang tidak lagi sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran perlu ditinjau kembali. Beberapa praktik adat yang memerlukan evaluasi antara lain keyakinan yang menghubungkan kegagalan panen dengan pelanggaran seksual, penerapan hukum *seda* yang cenderung berfokus pada pelanggaran seksual, serta penggunaan istilah "pernikahan adat" yang berpotensi menimbulkan kerancuan dengan ketentuan hukum gereja maupun hukum negara.

⁹ R. Ely Sipayo, *Mengenal Budaya Suku Tanalotong Di Sulawesi Barat* (Makassar: Oase Intim, 2020).

¹⁰ Robert P. Borrong, *Etika Bumi Baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009).

Dalam konteks tersebut, hukum *seda* masih memiliki nilai sebagai mekanisme pendidikan sosial dan penguatan tanggung jawab komunal, tetapi implementasinya perlu diarahkan pada tujuan restoratif, yaitu membangun perdamaian, memulihkan relasi sosial, dan menegakkan keadilan. Di samping itu, penerapan sanksi adat hendaknya tidak terbatas pada pelanggaran tertentu, melainkan mempertimbangkan berbagai bentuk pelanggaran sosial yang berdampak pada kehidupan bersama, termasuk kerusakan lingkungan, penyalahgunaan kewenangan, dan tindakan yang merugikan masyarakat.

Hasil angket terhadap 18 pendeta GKSB menunjukkan bahwa hubungan antara gereja dan *Tobara'* umumnya berlangsung dalam suasana yang harmonis. Akan tetapi, hubungan tersebut masih didominasi oleh kerja sama dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran seksual dan belum berkembang menjadi kolaborasi yang bersifat preventif maupun transformatif. Temuan ini menunjukkan bahwa potensi kemitraan antara gereja dan lembaga adat masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk menjawab berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Kalumpang.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan model kepemimpinan kolaboratif yang mengintegrasikan peran gereja, pemerintah desa, dan lembaga adat sebagai tiga pilar pembangunan masyarakat. Kolaborasi tersebut perlu diarahkan pada penyelesaian persoalan-persoalan strategis, seperti pembangunan manusia, pelestarian lingkungan, penguatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pembinaan etika sosial. Dalam kerangka ini, gereja tidak hanya menjalankan fungsi liturgis, tetapi juga berperan sebagai agen transformasi sosial yang memobilisasi seluruh potensi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, relasi antara gereja dan *Tobara'* perlu dikembangkan sebagai kemitraan yang bersifat dialogis, inklusif, dan transformatif. Sinergi tersebut memungkinkan nilai-nilai kekristenan dan kearifan lokal saling memperkaya dalam membangun masyarakat Kalumpang yang adil, berbudaya, berkelanjutan, dan sejahtera. Model kolaborasi ini sekaligus memperlihatkan bahwa gereja, pemerintah desa, dan lembaga adat merupakan tiga pilar yang saling melengkapi dalam menghadirkan transformasi sosial yang berakar pada iman, budaya, dan tanggung jawab bersama.

Tantangan pelayanan GKSB

Pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB) di wilayah Kalumpang berlangsung dalam konteks sosial yang kompleks. Tantangan yang dihadapi tidak hanya

berkaitan dengan pembinaan kehidupan spiritual jemaat, tetapi juga mencakup berbagai persoalan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Kondisi tersebut menuntut gereja untuk mengembangkan paradigma pelayanan yang bersifat holistik dan transformatif, sehingga pelayanan gereja tidak berhenti pada dimensi liturgis, tetapi juga menyentuh persoalan-persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Salah satu tantangan utama adalah masih tingginya tingkat kemiskinan dan keterbelakangan pada sebagian besar wilayah pelayanan GKSB. Keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan yang belum memadai, pelayanan kesehatan yang masih rendah, serta terbatasnya peluang ekonomi masyarakat menjadi persoalan yang saling berkaitan dan memengaruhi kualitas hidup jemaat. Dalam situasi demikian, pelayanan gereja tidak dapat dipisahkan dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, penguatan kapasitas keluarga, pengembangan ekonomi lokal, serta pendampingan terhadap kelompok-kelompok rentan.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara gereja dan pemerintah desa umumnya berlangsung secara harmonis, tetapi belum berkembang menjadi kemitraan yang strategis dalam merumuskan maupun mengawal kebijakan pembangunan. Interaksi yang masih bersifat seremonial menyebabkan potensi kolaborasi belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, gereja memiliki sumber daya moral dan sosial yang dapat berkontribusi dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Di sisi lain, relasi gereja dengan lembaga adat juga menghadapi tantangan tersendiri. Meskipun *Tobara'* masih memiliki legitimasi sosial yang kuat, fungsi kepemimpinan adat cenderung berpusat pada penegakan sanksi terhadap pelanggaran tertentu dan belum berkembang sebagai kekuatan edukatif maupun pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini membuka peluang bagi gereja untuk membangun kemitraan yang lebih konstruktif dengan lembaga adat dalam pelestarian nilai-nilai budaya yang sejalan dengan Injil, pendidikan karakter, penyelesaian konflik, serta penguatan etika sosial masyarakat.

Krisis ekologis juga menjadi tantangan yang semakin mendesak. Kerusakan hutan, pencemaran sungai, perubahan pola musim, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat Kalumpang yang bergantung pada

sumber daya alam. Persoalan ini menunjukkan bahwa pelayanan gereja perlu memperluas orientasinya menuju pelayanan ekologis dengan mengembangkan pendidikan lingkungan, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta membangun kesadaran teologis bahwa pemeliharaan ciptaan merupakan bagian integral dari panggilan iman.

Di samping tantangan eksternal, GKSB juga menghadapi tantangan internal berupa perlunya transformasi paradigma pelayanan. Pelayanan gereja masih sering dipahami sebagai aktivitas yang berpusat pada ibadah, pemberitaan firman, dan pelayanan pastoral, sementara keterlibatan dalam isu-isu publik belum menjadi bagian yang terintegrasi dari misi gereja. Akibatnya, fungsi profetis gereja dalam menyuarakan keadilan, membela kelompok yang lemah, mengawal kebijakan publik, serta membangun kolaborasi lintas lembaga belum berkembang secara optimal.

Dengan demikian, tantangan pelayanan GKSB pada hakikatnya merupakan tantangan untuk mentransformasikan identitas gereja dari institusi yang berorientasi pada pelayanan internal menjadi komunitas iman yang hadir secara aktif di ruang publik. Transformasi tersebut memerlukan kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan kolaboratif, serta kemampuan membangun sinergi dengan pemerintah desa, lembaga adat, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, GKSB tidak hanya mempertahankan relevansinya sebagai komunitas iman, tetapi juga berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat Kalumpang..

Model Sinergi Gereja–Pemerintah–Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja, pemerintah desa, dan lembaga adat memiliki legitimasi, sumber daya, serta pengaruh sosial yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Kalumpang. Meskipun hubungan antar ketiga institusi tersebut relatif harmonis, kolaborasi yang terbangun masih bersifat insidental, seremonial, dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara kuratif. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengembangan model sinergi yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada transformasi sosial.

Model sinergi yang diusulkan dalam penelitian ini bertumpu pada prinsip **kepemimpinan kolaboratif**, yaitu pola kepemimpinan yang menempatkan gereja,

pemerintah desa, dan *Tobara'* sebagai mitra strategis dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan masyarakat. Dalam model ini, setiap institusi tetap menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing, tetapi membangun koordinasi berdasarkan tujuan bersama, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalumpang.

Gereja berperan sebagai pembina spiritualitas, pendidikan karakter, serta suara profetis yang memperjuangkan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa menjalankan fungsi administratif, pelayanan publik, dan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sementara itu, *Tobara'* berperan sebagai penjaga nilai-nilai budaya, mediator sosial, serta penggerak etika komunal yang memperkuat kohesi masyarakat. Ketiga fungsi tersebut bukanlah fungsi yang saling bersaing, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis.

Implementasi model sinergi ini dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk kolaborasi. Pertama, membangun forum komunikasi reguler antara gereja, pemerintah desa, dan pemangku adat untuk membahas persoalan-persoalan strategis masyarakat. Kedua, menyusun program bersama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan, perlindungan anak dan perempuan, serta penguatan karakter generasi muda. Ketiga, mengembangkan pendidikan publik mengenai kepemimpinan yang berintegritas, tata kelola pemerintahan yang baik, serta tanggung jawab ekologis berbasis nilai-nilai Kristen dan kearifan lokal. Keempat, memperkuat mekanisme penyelesaian konflik melalui pendekatan dialogis yang mengintegrasikan nilai-nilai Injil dengan hukum adat yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Model sinergi tersebut merepresentasikan metafora "tali tiga lembar" sebagaimana diungkapkan dalam Pengkhotbah 4:12. Sebagaimana tiga helai tali memperoleh kekuatan ketika dipintal menjadi satu, demikian pula gereja, pemerintah desa, dan *Tobara'* akan memiliki daya transformasi yang lebih besar apabila membangun kerja sama yang dilandasi saling percaya, tanggung jawab bersama, dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi menjadi modal sosial yang memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Implikasi Teologis

Penelitian ini menegaskan bahwa panggilan gereja tidak dapat dipahami hanya dalam kerangka pelayanan liturgis dan pastoral, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial sebagai wujud nyata misi Allah (*missio Dei*). Kehadiran gereja di ruang publik merupakan manifestasi dari panggilan untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah melalui perjuangan mewujudkan keadilan, perdamaian, kesejahteraan, dan keutuhan ciptaan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa teologi publik menyediakan kerangka yang relevan bagi gereja untuk membangun relasi yang konstruktif dengan pemerintah dan lembaga adat. Gereja dipanggil menjadi mitra kritis pemerintah melalui dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi profetis ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan. Dalam relasinya dengan lembaga adat, gereja dipanggil melakukan dialog yang kritis dan kontekstual, yaitu menghargai nilai-nilai budaya yang selaras dengan Injil sambil mentransformasi praktik-praktik adat yang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai Kerajaan Allah.

Lebih jauh, penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep "tali tiga lembar" memiliki makna teologis sebagai simbol persekutuan, solidaritas, dan kolaborasi dalam mewujudkan kehidupan bersama. Gereja tidak dipanggil bekerja secara eksklusif, melainkan membangun kemitraan dengan seluruh unsur masyarakat demi menghadirkan transformasi sosial yang berakar pada kasih, keadilan, dan tanggung jawab terhadap sesama serta ciptaan Allah.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara gereja, pemerintah desa, dan lembaga adat merupakan kebutuhan strategis dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat Kalumpang. Ketiga institusi tersebut memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membangun kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa relasi yang telah terbangun masih didominasi oleh hubungan personal dan kegiatan seremonial sehingga belum berkembang menjadi kolaborasi kelembagaan yang bersifat strategis dan transformatif. Penelitian ini menghasilkan model sinergi gereja–pemerintah desa–

Tobara' yang berlandaskan metafora "tali tiga lembar" sebagai kontribusi konseptual bagi pengembangan teologi publik dan kepemimpinan kolaboratif dalam konteks masyarakat adat.

Metafora "tali tiga lembar" dalam Pengkhotbah 4:12 memberikan landasan teologis sekaligus filosofis bagi pengembangan model kepemimpinan kolaboratif. Kekuatan masyarakat tidak terletak pada dominasi satu institusi, melainkan pada kemampuan membangun sinergi antarlembaga yang didasarkan pada kepercayaan, dialog, dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, gereja perlu memperluas orientasi pelayanannya melalui kemitraan yang lebih intensif dengan pemerintah desa dan *Tobara'* dalam bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pembinaan etika sosial.

Pada akhirnya, relevansi pelayanan GKSB di tengah masyarakat Kalumpang akan semakin nyata apabila gereja mampu menghadirkan kepemimpinan yang adaptif, inklusif, dan kolaboratif. Melalui model sinergi gereja–pemerintah–adat, pelayanan gereja tidak hanya menghasilkan pertumbuhan spiritual jemaat, tetapi juga berkontribusi terhadap transformasi sosial yang menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan damai sejahtera sebagai wujud nyata kehadiran Kerajaan Allah di tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adiprasetya, Joas. "Pendeta Yang Adaptif: Most Wanted Atau Least Wanted." In *Calvinis Aktual*, edited by Budiman Haryanto. Jakarta: Komisi Pengkajian Teologi Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sinode Wilayah Jawa Barat, 2010.
- Calvin, Yohanes. *Institutio: Pengajaran Agama Kristen*. BPK Gunung Mulia, 1999.
- Eka Darmaputera. *Merayakan Hidup: Pemahaman Kitab Pengkhotbah Tentang Kesia-Siaan Segala Sesuatu*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Luturmas, Yulius. "Religion, Customs, and Village Government in Collaborating the Pillars of Rural Development." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 2, no. 4 (2022): 440–447.
- M.yusuf. "Eksistensi Pemangku Adat Dalam Pengambilan Keputusan Desa Di Kerinci." *Tanah Pilih* 1, no. 1 (2020): 11–19.
- Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. *Dokumen Keesaan Gereja: Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (DKG-PGI)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.
- Robert P. Borrong. *Etika Bumi Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Robert Setyo. "Hubungan Timbal Balik Antara Gereja Dan Negara." In *Calvinis Aktual*, edited by Budiman Haryanto. Jakarta: Komisi Pengkajian Teologi Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sinode Wilayah Jawa Barat, 2010.

Sipayo, R. Ely. *Mengenal Budaya Suku Tanalotong Di Sulawesi Barat*. Makassar: Oase Intim, 2020.

Sirangki, Henri, and Darius. "Sumbangsih Eksistensi Kepemimpinan Tobara' Terhadap Pembangunan Jemaat Di Lembang Siraun, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat." *SOPHIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 3, no. 1 (2022): 50–63.